



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

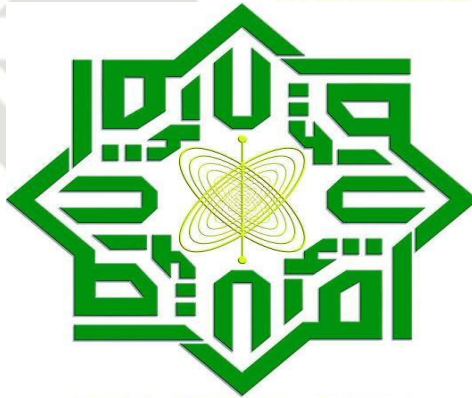
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

**LILIS YUNINGSIH**  
**NIM. 01770623312**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM  
 RIAU  
 2020**



**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA : LILIS YUNINGSIH  
 NIM : 01770623312  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 JUDUL : EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU  
 TANGGAL UJIAN : 28 APRIL 2020

Pekanbaru, 2 Maret 2020

Disetujui oleh:

**PEMBIMBING**

Sahwitri Triandani, SE, M. Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002

**MENGETAHUI**



**DEKAN**

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

**KETUA PROGRAM STUDI**

Sahwitri Triandani, SE, M. Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : LILIS YUNINGSIH  
 NIM : 01770623312  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 JUDUL : EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
 BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PENCAPAIAN  
 TARGET PENDAPATAN DAERAH PADA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN  
 PENDAPATAN DURI BADAN PENDAPATAN  
 DAERAH PROVINSI RIAU  
 TANGGAL UJIAN : 28 APRIL 2020

Pekanbaru, 11 Mei 2020

Disetujui oleh:

**KETUA PENGUJI**

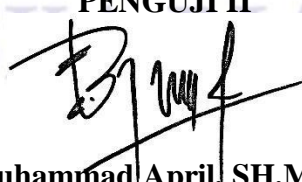
  
Sahwitri Triandani, SE, M. Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002

**MENGETAHUI**

**PENGUJI I**

  
Irien Vidlinda Anggriani, SE, M. Si  
 NIP. 19751106 2007 10 2 003

**PENGUJI II**

  
DR. Muhammad April, SH.M. Hum  
 NIK. 130712072

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh:

**LILIS YUNINGSIH**  
NIM. 01770623312

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terciptanya kedisiplinan serta tercapainya target pendapatan daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara interview, observasi, dan dokumentasi. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang mulai diterapkan sejak 15 Oktober 2019 – 14 Desember 2019. Efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap pencapaian target pendapatan daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan yang paling potensial bagi Kota Duri.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Pajak, Pemutihan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”. Adapun penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada keluarga besar penulis Ibundaku Paenah, Sp dan Ayahandaku Jamhuri selaku Orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang serta selalu mensupport dan memantau setiap perkembangan penulis. Saudara penulis yaitu Ade Hendrianto yang telah memberikan dukungan, dan semangat kepada penulis,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serta Abang Andika Syahputra yang telah memberikan perhatian dan selalu sabar menunggu proses penyelesaian tugas akhir ini. Tanpa cinta dari keluarga mungkin tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
3. Bapak DR. DRS. H. Muh. Said HM, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
5. Ibu Dr. Julina SE, M. Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Amrul Muzam SHI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
7. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M. Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan FEKONSOS UIN SUSKA RIAU sekaligus pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, MM selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan FEKONSOS UIN SUSKA RIAU yang telah bersedia memberikan bantuan berupa arahan dan masukan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UINSUSKA RIAU.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga semua bantuan, dukungan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih bai. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin yaa Rabbal'Alamiin.*

Pekanbaru, Maret 2020  
Penulis

**LILIS YUNINGSIH**  
**NIM. 01770623312**

UIN SUSKA RIAU

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iv**

**DAFTAR TABEL ..... viii**

**DAFTAR GAMBAR..... ix**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah ..... 1

1.2. Rumusan Masalah ..... 7

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 8

    1.3.1 Tujuan Penelitian ..... 8

    1.3.2 Manfaat Penelitian ..... 8

1.4. Metode Penelitian..... 9

    1.4.1 Lokasi Penelitian..... 9

    1.4.2 Waktu Penelitian..... 9

    1.4.3 Jenis Data..... 10

    1.4.4 Teknik Pengumpulan Data ..... 10

    1.4.5 Analisis Data..... 11

1.5. Sistematika Pembahasan ..... 12

**BAB 11 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

2.1. Dejarah Berdirinya Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri..... 13

2.2. Deskripsi Umum Kantor UPT Pengelolan Pendapatan Duri..... 14

2.3. Susunan Organisasi ..... 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Duri .....	16
2.5. Tugas dan Tanggung Jawab .....	16
2.6. Aktivitas Pelayanan di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri.....	19

**BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

3.1. Tinjauan Teori.....	23
3.1.1 Teori Pajak.....	23
1. Definisi Pajak.....	23
2. Dasar Hukum .....	24
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	25
4. Fungsi Pajak.....	26
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Penunggakan Pajak .....	27
3.1.2 Teori Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	29
1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	28
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	29
3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	30
4. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	31
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	32
6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	33
7. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilyah Pemungutan PKB	37
3.1.3 Teori Pemutihan Pajak .....	38
1. Definisi Pemutihan Pajak .....	38
2. Dasar Hukum Pemutihan Pajak .....	39
3. Dampak Positif dan Negatif Pemutihan Pajak .....	39
4. Penyebab Terjadinya Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	41
5. Mekanisme Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	41
3.1.4 Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	45
1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	45
2. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	45
3. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.5 Teori Efektivitas.....	47
1. Definisi Efektivitas.....	47
2. Ukuran Efektivitas .....	50
3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas .....	55
3.1.6 Pajak Dalam Islam.....	58
3.2. Tinjauan Praktek .....	61
3.2.1 Peenyebab Terjadinya Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	61
3.2.2 Mekanisme Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Tenkis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	62
3.2.3 Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau .....	65
1. Efektivitas dan Efisiensi .....	66
2. Kecukupan .....	67
3. Perataan/Kesamaan .....	68
4. Resposivitas .....	69
5. Ketepatan .....	71
3.2.2 Hasil Wawancara .....	71
1. Hasil Wawancara dengan Petugas Pajak Selaku Penyelenggara Pemutihan Pajak.....	72
2. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak.....	75
3.2.3 Perbandingan Teori, Praktek dalam Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua .....	79

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	89
4.2. Saran.....	90

© DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN .....	95



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

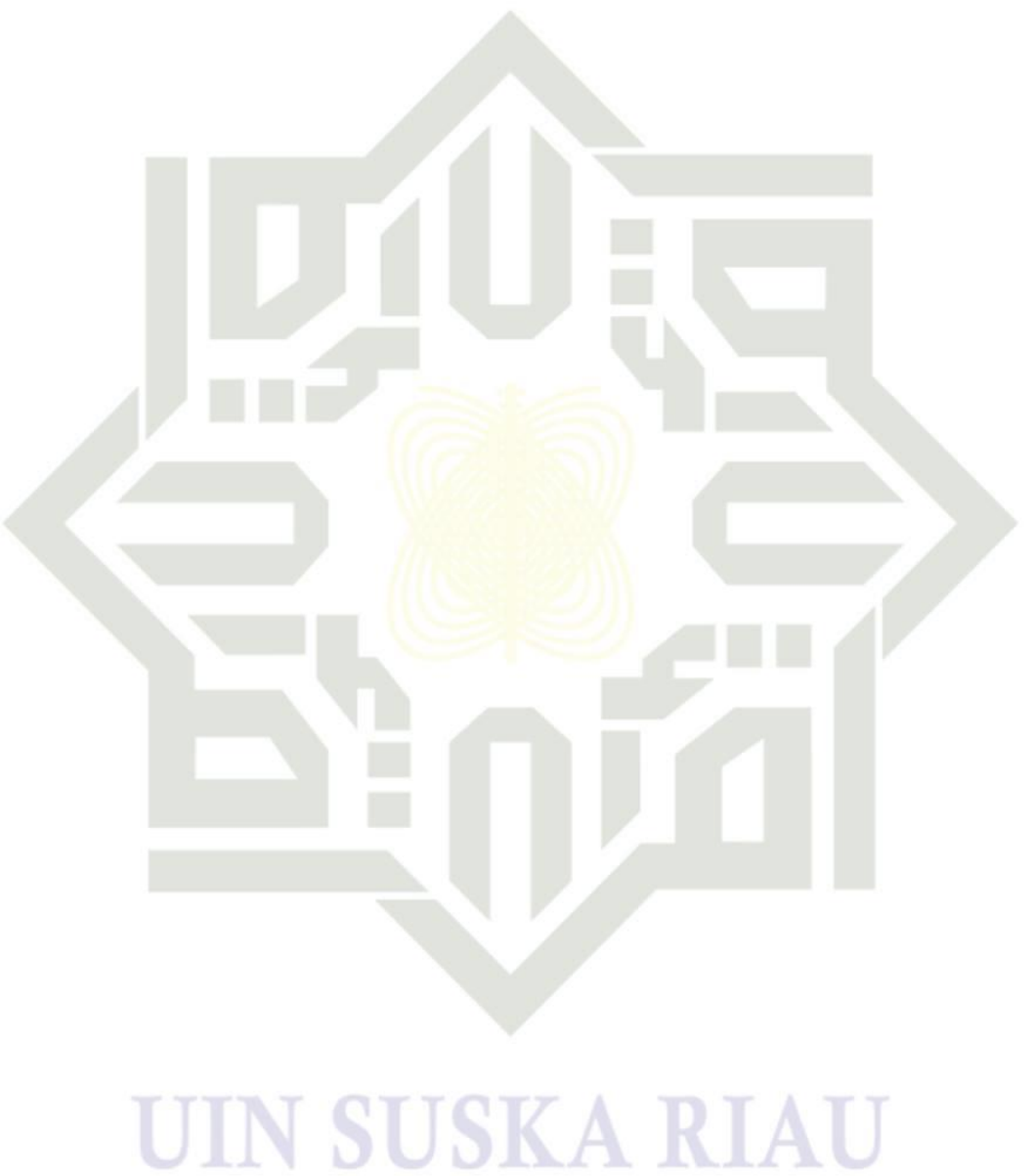
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Daftar Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2018-2020.....	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2017-2019.....	4
Tabel 1.3 Rekap Penerimaan Pergolongan Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 15 Agustus 2019 – 14 Desember 2019	6
Tabel 3.1 Perbandingan Teori, Praktek Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Duri..... 14



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melakukan banyak pembangunan disegala aspek demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam upaya tercapainya target pembangunan nasional yang merata tentunya bukan hal yang mudah. Pemerintah berkebijakan memberikan wewenang kepada masing – masing daerah untuk dapat mengatur pembangunan dan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengelola dan mengatur perekonomiannya atau dikenal dengan Otonomi Daerah.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan pajak daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

UIN SUSKA RIAU

Program pemutihan pajak yang diterapkan oleh Gubernur Riau dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak, Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau No. 51 Tahun 2019 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau lebih dikenal dengan Pemutihan Pajak. Mengingat wilayah kota Duri yang cukup luas dan masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan dan atas nama sendiri dengan terhindar dari tunggakan pajak. Berikut penulis sajikan daftar pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

**Tabel 1.1 Daftar Pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2018 – 2020**

No	Tahun Pajak	Waktu Pelaksanaan	Dasar Pelaksanaan
1	2018	22 Oktober-30 November	Peraturan Gubernur Riau No. 19 Tahun 2018 Tentang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Denda Bea Balik Nama Penyerahan ke 2.
2	2019	15 Oktober-14 Desember	Peraturan Gubernur Riau No. 51 Tahun 2019 Tentang Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3	2020	17 Maret-19 Mei	Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2020 Tentang Pembebasan /Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sumber : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak serta meningkatkan pendapatan daerah. Program pemutihan pajak yang diberlakukan, diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan. Selain itu dikarenakan kantor bersama SAMSAT tidak dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan bermotor terkhusus roda dua yang bermasalah. Kantor bersama SAMSAT hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah tersebut, baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraannya bisa melaksanakan pembayaran pajak tersebut disaat pemutihan, dan pemutakhiran data pemilik kendaraan plat kuning dan juga plat merah. Dengan adanya pemutihan pajak ini sudah efektif karena terlihat peningkatan dan pencapaian target pendapatan daerah dalam pembayaran pajak terkhusus kendaraan roda dua. Pemutihan dapat dilakukan diseluruh kantor SAMSAT termasuk Samsat Keliling dan Gerai Samsat.

Program pemutihan pajak yang dilalui, wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meringankan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan denda digratiskan, serta apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokok pajaknya saja. Kepala Sub Bagian (KASUBAG) Tata Usaha, mengatakan bahwa pelaksanaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terkhusus roda dua sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah terlihat dari tercapainya target pendapatan daerah. Berikut penulis sajikan target dan realisasi penerimaan atau pendapatan pajak kendaraan bermotor terkhusus roda dua pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2017 – 2019**

No	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	92.050.395.740,00	85.414.598.531,00	86,76
2	2018	86.349.493.549,19	86.684.047.030,00	95,64
3	2019	89.167.273.847,45	90.170.681.681,00	97,58

Sumber : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2019

Tabel 1.2 terlihat bahwa pada tahun 2017-2019 realisasi penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan, target yang ditetapkan pun meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 85.414.598.531,00 dari target Rp. 92.050.395.740,00 atau 86,76%, pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 86.684.047.030,00 dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

target Rp. 86.349.493.549,19 atau 96,64% dan pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp. 90.170.681.681,00 dari target Rp. 89.167.273.847,45 atau 97,58%.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam sistemnya wajib pajak diharuskan melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor di samsat terdekat sebelum masa pajaknya berakhir. Namun pada kenyataannya, masih terdapat data yang menyatakan bahwa terjadi penunggakan pajak di berbagai daerah.

Faktor penunggakan yang semakin meningkat penyebabnya adalah dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dan kesadaran atas pembayaran pajak itu sendiri. Penunggakan pajak kendaraan ini tentu berpengaruh akan pendapatan pajak daerah untuk mencapai target yang diharapkan. Pemerintah pun tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini. Upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak Gubernur Riau, Syamsuar mengumumkan pemberlakuan penghapusan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut sering disebut dengan kebijakan pemutihan dan tertuang dalam peraturan Gubernur

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan diberlakukan pada 15 Oktober 2019-14 Desember 2019. Sebagai pembandingan penulis menyajikan data terkait sebelum dan sesudah dilakukan pemutihan pajak tahun 2019.

**Tabel 1.3 Rekap Penerimaan Pergolongan Kendaraan Roda Dua Pada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan DuriBadan Pendapatan DaerahProvinsi Riau**

No	Jangka Waktu Pelaksanaan	Unit	Penerimaan
1	15 Agustus 2019 – 14 Oktober 2019	11.537	Rp. 5.168.543.898
2	15 Oktober 2019 – 14 Desember 2019	11.822	Rp. 5.406.697.545

Sumber : Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2019

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa penerimaan pendapatan daerah meningkat setelah dilakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor terkhusus roda dua. Penerimaan tiga bulan sebelum dilakukan pemutihan pajak pada 15 Agustus 2019 – 14 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.168.543.898 dari 11.537 unit kendaraan bermotor roda dua. Setelah dilakukan pemutihan pajak pada 15 Oktober 2019 – 14 Desember 2019 Penerimaan pendapatan daerah menjadi Rp. 5.406.697.545 dari 11.822 unit kendaraan bermotor roda dua. Besarnya peningkatan penerimaan pendapatan daerah setelah dilakukan pemutihan pajak adalah Rp. 238.153.647 diperoleh dari 285 unit kendaraan bermotor roda dua.

Pemutihan pajak kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Negara guna menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara tidak atau menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

periode tertentu. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak menimbulkan harapan pemerintah agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menambah pendapatan daerah. Berikut penulis sajikan daftar pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan berrmotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Bdan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Uraian di atas menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian tentang efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor terkhusus kendaraan bermotor roda dua dengan dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap pencapaian target pendapatan daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
2. Bagaimana mekanisme pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua sudah efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap pencapaian target pendapatan daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
3. Untuk mengetahui efektif tidaknya pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis :  
Menambah wawasan tentang efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap tercapainya target pendapatan daerah kota duri dan dampak pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua bagi kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat bagi pembaca :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua bagi mahasiswa di kemudian hari.

3. Manfaat bagi instansi :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran baru kepada Pemerintah Kota Duri tentang efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

**1.4 Metode Penelitian****1.4.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Duri Provinsi Riau , dengan objek penelitian pada Pendapatan Daerah Duri yang berlokasi di Jalan Harapan Jaya, No. 18, Air Jamban, Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kode Pos: 28784 Telepon: (0765) 94289.

**1.4.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu terhitung sejak Januari 2020 hingga Februari 2020.

### 1.4.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menurut ( Sugiyono 2012:139) menjelaskan Data Primer adalah data yang data yang didapatkan langsung di lapangan oleh penulis. Data Primer yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Provinsi Riau.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan diperoleh melalui beberapa dokumen yang sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku buku dan sebagainya. (Uma Sekaran, 2011:176)

### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Provinsi Riau. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagyo, 2011:39)
2. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi menurut (Sugiyono: 2015:329) yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir ini.

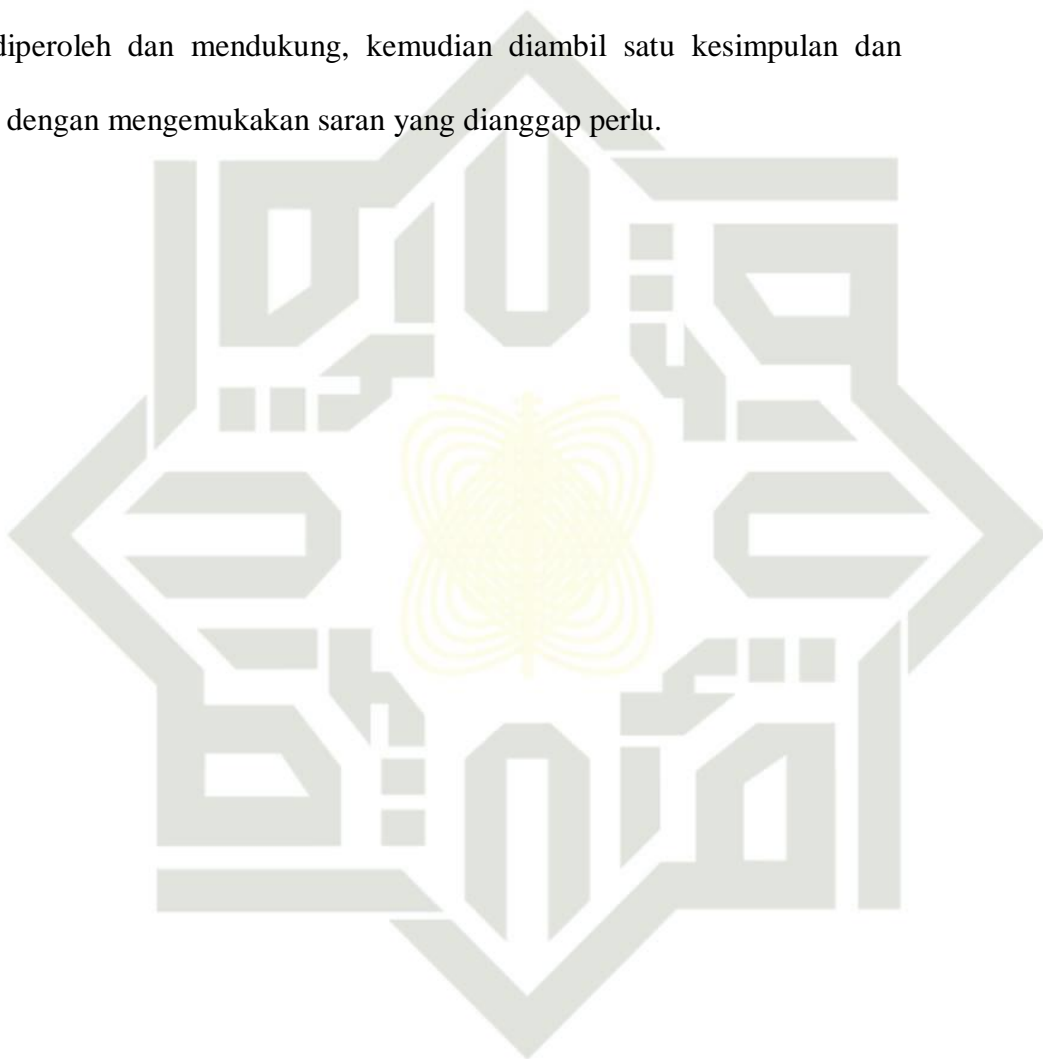
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada sedemikian rupa kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang sudah diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk keperluan penyusunan ini nantinya, maka secara umum penulis menguraikan kedalam empat Bab yang masing masing Bab menjadi sub Bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan Bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang diakhiri sistematika pembahasan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Merupakan uraian tentang gambaran dan struktur organisasi instansi pemerintahan Kantor Samsat Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Merupakan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran bermanfaat bagi instansi pemerintah Kantor Samsat Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Berdirinya Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri berdiri pada tahun 2002 dimana sebelumnya di kantor ini bergabung dengan samsat Dumai. Bersama Kapolri Dirjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999 No. 973-1220 dan Nomor SKEP/02/X/1999 Tanggal 15 Oktober 1999 Tentang Pedoman Tata Laksana SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) ini bergerak dibidang pelayanan / perpajakan / pengurusan BPKB dan MUTASI Kendaraan Bermotor dari daerah satu kedaerah lainnya. Kantor ini sudah bergerak dan berjalan lebih kurang 15 tahun. Dimana kantor ini berubah POS Pelayanan Pendapatan Duri, barulah tahun 2009 UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Duri.

Kantor ini tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap) Pembantu PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di wilayah Duri-Riau. Kantor ini salah satu bentuk telegram kapolri No. Pol : T/673/1993 Tangga; 17 Juni 1993 Tentang MUTASI Kendaraan Bermotor, sesuai dengan tata yang diperlukan, dan terhadap RANMOR (Kendaraan Bermotor) tersebut wajib dilakukan penelitian dokumen serta pengecekan fisik atas RANMOR (Kendaraan Bermotor) tersebut sesuai dengan persyaratan guna menghindari terjadinya kendaraan tersebut apakah asli atau ilegal (Kendaraan Curian) untuk dapat

melaksanakan ilegal sampai dukungan ini penuh dari seluruh Elemen Teknik Pembayaran dan seluruh Kepolisian dan Jasa Raharja. Masyarakat diharapkan dapat menerima dan menjalankan program sistem pelayanan ini sebagai salah satu tanggung jawab utamanya yang bertujuan yang menerapkan kenyamanan.

## 2.2 Deskripsi Umum Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri

Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau atau lebih dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah kantor yang umumnya bergerak dibidang sistem pelayanan perpajakan kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan bermotor dan selama lima tahun harus ganti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Mutasi atau mencabut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terbagi menjadi dua macam, yaitu mutasi masuk dan mutasi keluar. Mutasi masuk adalah dimana suatu kendaraan baik roda dua maupun roda empat dari daerah wilayah lain masuk ke daerah kita, begitu juga sebaliknya dengan mutasi keluar.

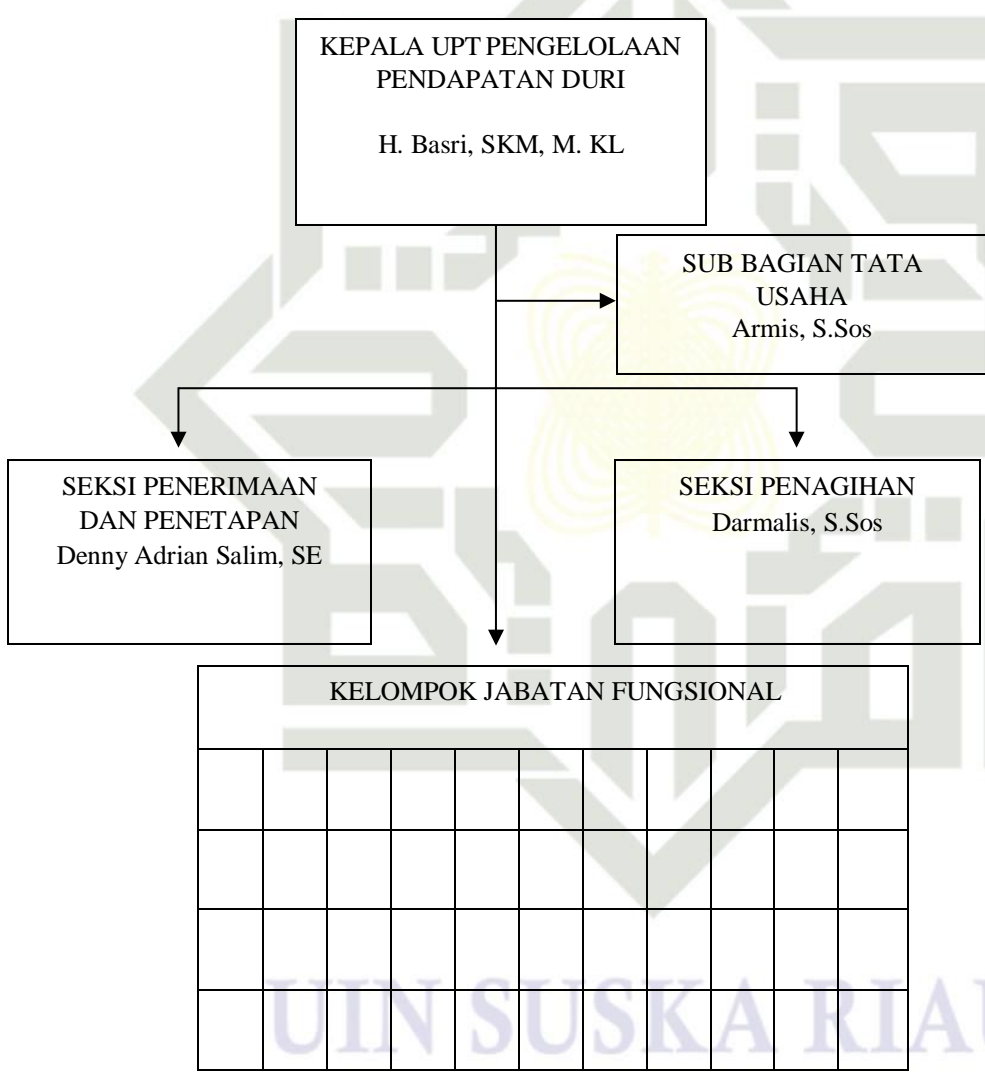
### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Lampiran X Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017, struktur organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Duri adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Duri**



Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Duri 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan Organisasi Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Duri
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penerimaan dan Penetapan
4. Seksi Penagihan

#### 2.4 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Duri

**Visi** : “Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem manajemen perpajakan kelas dini yang dibanggakan masyarakat.”

**Misi** : “Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian keuangan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas yang tinggi.”

#### 2.5 Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Duri

Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Duri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengelolaan Pendapatan Duri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Duri.
  - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan.
  - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Tata Usaha
- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub Bagian Tata Usaha.
  - 2) Memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha.
  - 3) Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
  - 4) Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
  - 5) Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat.
  - 6) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
  - 7) Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor.
  - 9) Melakukan pemantauan, evaluasi membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha.
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Seksi Penerimaan dan Penetapan
- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penerimaan.
  - 2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan.
  - 3) Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan.
  - 4) Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
  - 5) Melakukan penggandaan dan pengembangan pendapatan.
  - 6) Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
  - 7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penerimaan.
  - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Seksi Penagihan

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan.
- 3) Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pendapatan.
- 4) Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
- 5) Melakukan penggandaan dan pengembangan pendapatan.
- 6) Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
- 7) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penagihan.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.6 Aktifitas Pelayanan di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri

Sebagaimana yang diketahui bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau merupakan wewenang yang bertujuan menerbitkan dan mengesahkan segala surat-surat yang berhubungan dengan segala jenis kendaraan terutama kendaraan yang merupakan transportasi darat.

Adapun jenis tugas lain sebagai aktifitas pelayanan dari struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kasat
 

Merupakan kepala satuan lalu lintas polres Riau. Kasat ini memiliki tanggung jawab yang paling tinggi.
2. Baur STNK
 

Ini merupakan bintangan urusan STNK
3. Putor TNKB
 

Adalah petugas samsat yang bertanggung jawab tentang pembuatan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
4. Baur Cek Fisik
 

Cek fisik kendaraan bermotor merupakan bagian utama penerbitan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
5. Baur Mutasi
 

Merupakan bagian yang sama dengan bagian cek fisik. Kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan merupakan identitas pertama pada kendaraan bermotor yang sudah dikeluarkandari dealer yang memenuhi sehingga baru dapat didaftarkan penerbitan BPKB dan STNK.
6. Pendaftaran
 

Bagian pendaftaran ini memiliki tugas dan fungsi melakukan atau mengurus masyarakat yang akan melakukan transaksi awal dengan mengisi suatu formulir yang bertujuan untuk pengenalan diri ke suatu instansi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 7. BPKB

Bagian BPKB ini yang akan menerbitkan atau mengeluarkan buku kepemilikan kendaraan bermotor sebagai bukti yang sah kepemilikan kendaraan bermotor.

#### 8. STNK

Yang akan menerbitkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftarkan.

#### 9. File

Salah satu bagian yang penting karena bagian ini adalah bagian kearsipan segala macam surat-surat penting yang telah diterbitkan agar tidak hilang.

#### 10. Reg STNK

Bagian yang meregistrasi buku kendaraan bermotor.

#### 11. Reg Ranmor

Bagian yang akan meregistrasi buku kendaraan bermotor.

#### 12. Buku Induk

Bagian pencatatan buku kendaraan bermotor.

#### 13. Perpanjangan

Bagian yang mengurus apabila masa berlaku kendaraan STNK telah habis dalam jangka waktu lima tahun maka dilakukan pergantian atau perpanjangan STNK.

#### 14. Duplikat

Mengurus apanila pemilik kendaraan mengalami kehilangan STNK maka dapat diberi permohonan duplikat STNK serta melalui surat hilang dari kepolisian.

#### 15. Ganti Nomor Polisi

Mengurus pergantian nomor polisi dimana pemilik kendaraan diminta untuk tidak merubah tata cara letak nomor polisis pada plat nomor yang sudah ditetapkan kepolisian Negara RI. Apabila nomor polisinya sudah rusak maka disarankan mengganti nomor polisi tersebut dengan yang dikeluarkan dari kantor samsat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan yang telah disajikan dan dikorelasikan berdasarkan teori pada bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini peneliti merumuskan rekomendasi saran-saran yang dapat bermanfaat untuk mewujudkan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua yang efektif.

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dapat disimpulkan

1. Secara keseluruhan ditinjau dari jumlah pendapatan daerah yang diterima selama masa pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua di UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengalami peningkatan dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua pada UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sudah efektif, terlihat dari tepenuhinya ukuran efektivitas yang mencakup indikator efisiensi dalam hal Sumber Daya Manusia (SDA), indikator kecukupan yang sudah memenuhi harapan dan mempunyai nilai ekonomi

untuk masyarakat, indikator perataan dikarenakan masyarakat mendapat manfaat yang sama dari program tersebut, indikator responsivitas yang menyatakan bahwa masyarakat sangat merespon dengan sangat baik terkait adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor terlihat dari ramainya masyarakat yang datang ke samsat untuk mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor, serta terpenuhinya indikator ketepatan yang menyatakan bahwa tujuan dari pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sudah tepat sasaran yaitu menarik minat masyarakat agar terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak dan tentunya meningkatkan pendapatan daerah.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Mempertahankan keseluruhan indikator terkait tercapainya efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dan mempertahankan kinerja dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor khususnya roda dua.
2. Sebaiknya terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan agar tujuan dan sasaran dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dapat tercapai dengan maksimal dan sampai kepada masyarakat dengan baik khususnya para wp yang mengikuti program ini. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melakukan pendekatan personal agar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi tersebut dapat dimengerti oleh wajib pajak secara keseluruhan sehingga wajib pajak disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor terus meningkat.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. 2014. Surah An – Nisa' ayat 29, Al – Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.

Altius, Herline Yudhah, Erliana, dan H.B Tarmizi. 2013. Kontribusi Pajak Kendaraan bermotor Terhadap PAD dan Dampaknya Bagi Perkembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*. Vol 16 No. 3/ Diakses pada Kamis, 20 Februari 2020 pukul 10.12 WIB.

*Arsip Peraturan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Riau*. No: 35. 1, 2012

*Arsip UPTD Pendapatan Duri Kabupaten Bengkalis*, 2014.

Damang. 2011, *Pajak Kendaraan Bermotor*, Cetakan kedua, Gramedia, Jakarta.

Edy, Sutrisno, (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ekasari, Luh Dina. Akbari, Febrian, 2017, *Skripsi*. Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Eryandi, Gusti, Lizar Alfansi dan Benardin, 2008. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nmaa Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ekonomi*. Volume 04 Nomor 02/ Diakses pada Kamis, 20 Februari 2020 pukul 10.29 WIB.

Arin Fitriani, Rosdiana, Weni, 2018, *Skripsi*. Efektifitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Mojokerto (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kecamatan Kranggan). Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

Rahmat Hidayat, 2012, *Tugas Akhir*. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sulawesi Tengah.

Hutomo, R.O.A, 2017, *Srpsi*. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 Tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah PROVINSI Kalimantan Barat. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Panca Bhakti.

Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

\_\_\_\_\_. 2016, *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Martadani, P. D. & Hertati, D, 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang, *Public Administration Journal*, 1(1), 34-48. Dikutip pada senin, 10 februari 2020 pukul 08.01.

Muasaroh. 2010. Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelsksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Universitas Brawijaya Malang.

Pane, Pontas 2014. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Pekanbaru: Kantor DJP Riau dan Kepulauan Riau.

Siahaan, Marihot Pahala, 2016. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Cetakan 4, Jakarta, Rajawali Pers.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian UPT Badan Pendapatan Daerah Jombang [online] tersedia di <http://www.Surabaya.tribunnews.com>, diakses Rabu, 12 Februari 2020 pukul 09.02 WIB.

Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif Efisien dan Profesional*. Bandung:Alfabeta.

Putra Prasetya, 2018, *Tugas Akhir*. Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.

Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jilid 1. Salemba Empat, Jakarta : Salemba Empat.

Halimah Tusakdiah, 2011, *Tugas Akhir*. Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau, Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Widyaningsih, Aristanti, 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung, Alfabeta.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> diakses pada senin,10 februari 2010 pukul 08.11 WIB

<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> diakses pada senin 10 februari 2010 pukul 08.25 WIB

<http://etheses.uin-malang.ac.id/11401/1/13220090.pdf> diakses pada selasa 11 februari 2020 pukul 20.05 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[http://repository.uin-suska.ac.id/5186/1/2013\\_2013261AKN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/5186/1/2013_2013261AKN.pdf). diakses pada  
selasa 11 february 2020 pukul 20.29 WIB

<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> Diakses pada senin, 17  
february 2020 pukul 16.00 WIB

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara dengan pegawai Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah selaku petugas pajak:

1. Kapan mulai diadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor atau penghapusan sanksi administratif pada UPT Pengelolaan Pendapatan Duri?
2. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahun?
3. Apa dasar hukum dilakukannya pemutihan pajak kendaraan bermotor 2019 lalu?
4. Mengapa terjadi pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap pencapaian target pendapatan daerah khususnya pada UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
5. Apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua sudah efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pada UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
6. Apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua terkait adanya pemutihan pajak?
7. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua pada saat terjadinya pemutihan pajak?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Sebutkan dampak positif dan negative dari pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermototr roda dua bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau!
9. Apa saja keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua bagi UPT Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
10. Dimana saja pemutihan pajak dapat dilakukan? Apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di gerai samsat ataupun samsat keliling?
11. Apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan untuk pembayaran pajak saja? Bagaimana untuk Mutasi dan BBNKB? Apakah dapat juga diberlakukan pemutihan pajak ?
12. Apakah ada rentang waktu bagi penunggak pajak yang akan mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor khussunya roda dua?

Daftar pertanyaan wawancara dengan wajib pajak:

1. Berapa jumlah kendaraan yang ibu miliki?
2. Apakah Ibu pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apa yang mendasari Ibu tidak pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Menurut pendapat Ibu, apa faktor yang menyebabkan seseorang telat membayar pajak kendaraan bermotor?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah Ibu mengetahui adanya program pemutihan [ajak kendaraan bermotor tahun 2019? Apa saja yang ibu ketahui tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor?
6. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pemutihan pajak? Apakah program tersebut membantu masyarakat?
7. Apa manfaat dari pemutihan pajak kendaraan bermotor yang Ibu rasakan atau ketahui?
8. Apakah ada kerugian atau masalah yang disebabkan oleh pemutihan pajak kendaraan bermotor?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017

DAFTAR 8. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017  
UPT PENDAPATAN DURI  
BULAN : DESEMBER 2017

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2017	TARGET PERUBAHAN	REALISASI PENERIMAAN			%
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	
<b>PAJAK DAERAH</b>							
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	77.109.268.966,00	-	6.106.684.500	62.415.220.250	68.521.904.750	88,86
2	PKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar	40.631.756,00	-	-	49.846.656	49.846.656	122,68
3	Penyewaan Tanah & Bangunan	-	-	3.600.000	7.200.000	10.800.000	-
4	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	14.329.383.442,49	-	995.054.500	9.914.973.500	10.900.028.000	76,07
5	BBN-KB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar	-	-	-	-	16.410.000	-
6	Bea Balik Nama Alat Angkutan di Atas Air (BBN A3)	-	-	-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan (AP)	346.111.575,51	-	28.116.486	221.613.073	249.729.559	72,15
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>							
1	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga	225.000.000	-	12.900.000	130.680.000	143.580.000	63,81
<b>Pendapatan Denda</b>							
1	Pendapatan Denda PKB	-	-	606.483.978	4.808.474.388	5.414.958.366	-
2	Pendapatan Denda BBN-KB	-	-	3.380.560	103.958.640	107.339.200	-
3	Pendapatan Denda AB	-	-	-	-	-	-
4	Pendapatan Denda BBN A3	-	-	-	-	-	-
5	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-	-
6	Tunggakan PKB	-	-	-	-	-	-
7	Tunggakan Denda BBN-KB	-	-	-	-	-	-
8	Tunggakan PA3	-	-	-	-	-	-
9	Tunggakan BBN A3	-	-	-	-	-	-
10	Tunggakan AP	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>92.050.395.740,00</b>	<b>-</b>	<b>7.746.220.024</b>	<b>77.668.378.507</b>	<b>85.414.598.531</b>	<b>88,78</b>

## TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018

DAFTAR 8. REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018  
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI  
BULAN : DESEMBER 2018

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2018	TARGET PERUBAHAN	REALISASI PENERIMAAN			%
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	
<b>PAJAK DAERAH</b>							
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	73.476.898.026,83	-	5.562.152.500	65.045.737.253	70.607.889.753	96,08
2	PKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar	152.666.750,68	-	-	45.777.256	45.777.256	29,98
3	Penyewaan Tanah & Bangunan	-	-	7.200.000	7.200.000	14.400.000	-
4	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	11.929.383.442,49	-	1.103.460.000	10.372.496.706	11.475.946.706	96,20
5	BBN-KB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar	61.500.592,10	-	-	22.293.750	22.293.750	-
6	Bea Balik Nama Alat Angkutan di Atas Air (BBN A3)	-	-	-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan (AP)	542.466.133,29	-	31.438.129	251.208.688	282.646.797	52,10
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>							
1	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga	184.578.604	-	15.440.000	131.680.000	147.120.000	79,71
<b>Pendapatan Denda</b>							
1	Pendapatan Denda PKB	-	-	337.269.687	3.660.386.636	3.997.656.323	-
2	Pendapatan Denda BBN-KB	-	-	3.847.060	85.077.168	88.924.228	-
3	Pendapatan Denda AB	-	-	-	1.392.217	1.392.217	-
4	Pendapatan Denda BBN A3	-	-	-	-	-	-
5	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-	-
6	Tunggakan PKB	-	-	-	-	-	-
7	Tunggakan Denda BBN-KB	-	-	-	-	-	-
8	Tunggakan PA3	-	-	-	-	-	-
9	Tunggakan BBN A3	-	-	-	-	-	-
10	Tunggakan AP	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>86.349.493.549,19</b>	<b>-</b>	<b>7.090.807.376</b>	<b>79.623.239.654</b>	<b>86.684.047.030</b>	<b>95,64</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019

DAFTAR 8 : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019  
UPTU PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI  
BULAN : DESEMBER 2019

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET 2019	TARGET PERUBAHAN	REALISASI PENERIMAAN			%
				BULAN INI	SID BULAN LALU	SID BULAN INI	
<b>PAJAK DAERAH</b>							
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	74.206.976.254,71	-	7.344.465.500	66.049.086.500	73.393.552.000	98,90
2	PKB Alat Berat dan Alat Berat Besar	40.919.807,50	-	4.800.000	53.697.928	53.697.928	131,23
3	Penyewaan Tanah & Bangunan	-	-	936.083.000	12.076.413.500	14.400.000	88,43
4	Beban Bank Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	14.550.562.273,62	-	-	-	-	-
5	BBN-KB Alat Berat dan Alat Berat Besar	99.969.138,06	-	-	-	-	-
6	Beban Bank Nama Air Angkutan di Atas Air (BBN-A3)	-	-	32.837.893	349.361.348	382.199.241	142,16
7	Pajak Air Permukaan (AP)	268.846.373,56	-	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>							
1	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	11.460.000	153.200.000	164.660.000	-
<b>Pendapatan Denda</b>							
1	Pendapatan Denda PKB	-	-	157.762.368	2.929.002.293	3.086.764.661	-
2	Pendapatan Denda BBN-KB	-	-	2.179.500	58.990.320	61.169.820	-
3	Pendapatan Denda AB	-	-	-	1.741.531	1.741.531	-
4	Pendapatan Denda BBN-A3	-	-	-	-	-	-
5	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-	-
6	Tunggakan PKB	-	-	-	-	-	-
7	Tunggakan Denda BBN-KB	-	-	-	-	-	-
8	Tunggakan PA3	-	-	-	-	-	-
9	Tunggakan BBN-A3	-	-	-	-	-	-
10	Tunggakan AP	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		89.167.273.847,45	-	8.489.588.261	81.681.093.420	90.170.681.681	97,58

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAPORAN REKAP PENERIMAAN PERGOLONGAN KENDARAAN TAHUN 2017

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN PER GOLONGAN KENDARAAN**  
WILAYAH DURI USER \* ALL \*, JENIS PENDAFTARAN \* ALL \*  
TANGGAL 01 JANUARI 2017 S/D 31 DESEMBER 2017

No	Golongan Kendaraan	Unit	BBN-KB				PKB				SWDKLLJ		T
			Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok	Denda	
1	BUS	28	1.113.000	0	0	0	33.755.000	5.580.000	7.784.074	111.600	3.706.300	770.750	
2	JEEP	1.684	176.167.000	0	13.310.500	342.590	5.259.228.000	124.259.500	249.697.060	1.606.840	242.878.400	24.450.000	6,7
3	LIGHT TRUCK	444	15.693.000	0	1.506.000	0	961.051.500	105.162.000	124.080.632	262.480	76.549.600	11.975.000	1,3
4	MICROBUS	437	28.803.000	0	528.000	27.720	570.111.500	39.770.000	60.707.357	783.920	49.142.800	9.377.500	7
5	MINIBUS	13.038	649.771.000	0	31.870.000	168.040	23.862.994.500	653.759.000	1.180.460.504	7.358.120	1.849.032.700	126.273.150	29,3
6	PICK UP	5.038	184.368.000	0	8.844.500	59.000	11.478.837.500	397.474.500	937.761.540	11.399.030	793.330.400	109.612.500	14,4
7	SEDAN	361	53.320.500	0	2.187.000	3.280.400	469.229.500	27.103.500	36.018.773	1.637.440	54.088.300	8.895.000	7
8	SPD MOTOR R2	63.382	9.500.984.500	0	15.364.000	17.260.630	11.120.307.500	803.844.500	987.269.433	3.224.360	2.363.714.900	362.232.000	27,33
9	SPD MOTOR R3	11	1.386.000	0	0	0	2.003.500	0	30.685	0	380.000	16.000	0,4
10	TRUCK	2.861	288.422.000	0	12.636.000	154.000	10.733.996.700	1.631.435.500	1.630.839.548	173.908.950	438.554.000	34.295.000	15,2
		<b>87.484</b>	<b>10.990.028.000</b>	<b>0</b>	<b>86.046.000</b>	<b>21.293.200</b>	<b>64.511.517.250</b>	<b>4.010.347.500</b>	<b>5.214.669.625</b>	<b>200.282.740</b>	<b>5.893.382.600</b>	<b>738.497.500</b>	<b>95,5</b>

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN PER GOLONGAN KENDARAAN**  
WILAYAH DURI USER \* ALL \*, JENIS PENDAFTARAN \* ALL \*  
TANGGAL 01 JANUARI 2017 S/D 31 DESEMBER 2017

Golongan Kendaraan	Unit	BBN-KB				PKB				SWDKLLJ		TOTAL
		Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok	Denda	
BUS	28	1.113.000	0	0	0	33.755.000	5.580.000	7.784.074	111.600	3.706.300	770.750	
JEEP	1.684	176.167.000	0	13.310.500	342.590	5.259.228.000	124.259.500	249.697.060	1.606.840	242.878.400	24.450.000	6,7
LIGHT TRUCK	444	15.693.000	0	1.506.000	0	961.051.500	105.162.000	124.080.632	262.480	76.549.600	11.975.000	1,3
MICROBUS	437	28.803.000	0	528.000	27.720	570.111.500	39.770.000	60.707.357	783.920	49.142.800	9.377.500	7
MINIBUS	13,038	649.771.000	0	31,870.000	168.040	23.862.994.500	653.759.000	1.180.460.504	7.358.120	1.849.032.700	126.273.150	29,3
PICK UP	5,038	184.368.000	0	8.844.500	59.000	11.478.837.500	397.474.500	937.761.540	11.399.030	793.330.400	109.612.500	14,4
SEDAN	361	53.320.500	0	2.187.000	3.280.400	469.229.500	27.103.500	36.018.773	1.637.440	54.088.300	8.895.000	7
SPD MOTOR R2	63,382	9.500.984.500	0	15.364.000	17.260.630	11.120.307.500	803.844.500	987.269.433	3.224.360	2.363.714.900	362.232.000	27,33
SPD MOTOR R3	11	1.386.000	0	0	0	2.003.500	0	30.685	0	380.000	16.000	0,4
TRUCK	2.861	288.422.000	0	12.636.000	154.000	10.733.996.700	1.631.435.500	1.630.839.548	173.908.950	438.554.000	34.295.000	15,2
	<b>87.484</b>	<b>10.990.028.000</b>	<b>0</b>	<b>86.046.000</b>	<b>21.293.200</b>	<b>64.511.517.250</b>	<b>4.010.347.500</b>	<b>5.214.669.625</b>	<b>200.282.740</b>	<b>5.893.382.600</b>	<b>738.497.500</b>	<b>95,5</b>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAPORAN REKAP PENERIMAAN PERGOLONGAN KENDARAAN TAHUN 2018

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN PER GOLONGAN KENDARAAN**  
WILAYAH : DURI USER \* ALL \* JENIS PENDAFTARAN : \* ALL \*  
TANGGAL : 01 JANUARI 2018 S/D 03 DESEMBER 2018

No	Golongan Kendaraan	Unit	BBN-KB				PKB				SWDKLLJ		T
			Pokok	Tunggakan	Denda	Dmd Kas	Pokok	Tunggakan	Denda	Dmd Kas	Pokok	Denda	
1	US	16	0	0	0	0	31.498.000	0	942.270	0	1.548.000	37.500	
2	KEP	1.596	198.113.341	0	15.969.734	0	5.239.256.976	175.578.155	265.238.121	809.880	234.140.800	18.455.000	6.7
3	TRUCK	457	45.737.500	0	3.803.000	0	1.036.499.530	201.627.500	136.880.594	837.730	82.988.100	10.907.000	1.3
4	MICROBUS	444	15.207.500	0	2.032.500	0	605.261.325	84.378.900	77.432.597	2.303.165	50.344.300	7.455.500	8
5	MINIBUS	12.140	711.458.325	0	39.200.574	202.000	22.959.911.769	825.581.260	1.010.127.253	10.400.662	1.750.564.600	104.644.500	14.400.521.663
6	PICK UP	4.697	175.825.000	0	6.006.500	0	11.551.848.316	809.897.989	746.828.425	6.293.253	777.772.200	77.950.000	14.4
7	SEDAN	310	29.619.500	0	4.521.000	40.800	405.415.037	29.886.000	26.236.016	265.070	49.430.000	4.705.000	?
8	SPD MOTOR R2	38.535	8.947.021.840	0	5.150.990	1.541.840	10.479.240.849	1.696.735.555	948.349.799	956.690	2.228.504.200	234.056.000	256.887
9	SPD MOTOR R3	0	0	0	0	0	1.505.500	0	168.925	0	315.000	32.000	
10	TRUCK	2.474	262.644.700	0	5.904.500	1.464.160	9.570.879.152	480.392.440	523.401.851	18.518.300	405.184.800	29.055.000	11.4
		<b>80.680</b>	<b>10.384.027.706</b>	<b>0</b>	<b>65.409.019</b>	<b>2.248.050</b>	<b>61.879.316.454</b>	<b>6.614.230.799</b>	<b>3.635.685.851</b>	<b>40.404.750</b>	<b>6.480.798.000</b>	<b>487.277.500</b>	<b>89.099.645.728</b>

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN PER GOLONGAN KENDARAAN**  
WILAYAH : DURI USER \* ALL \* JENIS PENDAFTARAN : \* ALL \*  
TANGGAL : 01 JANUARI 2018 S/D 03 DESEMBER 2018

Golongan Kendaraan	Unit	BBN-KB				PKB				SWDKLLJ		TOTAL
		Pokok	Tunggakan	Denda	Dmd Kas	Pokok	Tunggakan	Denda	Dmd Kas	Pokok	Denda	
US	16	0	0	0	0	31.498.000	0	942.270	0	1.548.000	37.500	35.573.770
KEP	1.596	198.113.341	0	15.969.734	0	5.239.256.976	175.578.155	265.238.121	809.880	234.140.800	18.455.000	6.265.992.007
TRUCK	457	45.737.500	0	3.803.000	0	1.036.499.530	201.627.500	136.880.594	837.730	82.988.100	10.907.000	1.557.969.974
MICROBUS	444	15.207.500	0	2.032.500	0	605.261.325	84.378.900	77.432.597	2.303.165	50.344.300	7.455.500	688.916.787
MINIBUS	12.140	711.458.325	0	39.200.574	202.000	22.959.911.769	825.581.260	1.010.127.253	10.400.662	1.750.564.600	104.644.500	28.248.790.993
PICK UP	4.697	175.825.000	0	6.006.500	0	11.551.848.316	809.897.989	746.828.425	6.293.253	777.772.200	77.950.000	14.400.521.663
SEDAN	310	29.619.500	0	4.521.000	40.800	405.415.037	29.886.000	26.236.016	265.070	49.430.000	4.705.000	576.370.423
SPD MOTOR R2	38.535	8.947.021.840	0	5.150.990	1.541.840	10.479.240.849	1.696.735.555	948.349.799	956.690	2.228.504.200	234.056.000	25.608.932.763
SPD MOTOR R3	0	0	0	0	0	1.505.500	0	168.925	0	315.000	32.000	2.901.425
TRUCK	2.474	262.644.700	0	5.904.500	1.464.160	9.570.879.152	480.392.440	523.401.851	18.518.300	405.184.800	29.055.000	11.474.844.903
	<b>80.680</b>	<b>10.384.027.706</b>	<b>0</b>	<b>62.593.818</b>	<b>3.248.050</b>	<b>61.879.316.454</b>	<b>6.614.230.799</b>	<b>3.635.685.851</b>	<b>40.404.750</b>	<b>6.480.798.000</b>	<b>487.277.500</b>	<b>89.099.645.728</b>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAPORAN REKAP PENERIMAAN PERGOLONGAN KENDARAAN TAHUN 2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN PER GOLONGAN KENDARAAN**  
WILAYAH: DURI USER \* ALL \* JENIS PENDAFTARAN: \* ALL \*  
TANGGAL: 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

No	Golongan Kendaraan	Unit	BBN-KB			PKB				SWDKLLJ		T	
			Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok		Denda
1	BUS	17	0	0	0	0	29.990.000	0	212.790	0	1.944.000	118.500	
2	BERP	1.853	222.886.500	0	11.441.000	113.600	6.486.707.000	257.464.000	229.377.672	5.383.780	275.145.300	21.085.000	7.6
3	LIGHT TRUCK	387	19.842.000	0	1.047.500	0	863.433.500	103.621.500	70.422.543	156.780	67.244.700	7.140.000	1.1
4	MICROBUS	410	11.331.000	0	411.000	0	482.661.500	54.051.500	39.393.076	559.770	45.177.500	4.945.250	e
5	MINIBUS	13.896	775.636.500	0	30.722.500	186.200	26.828.476.438	922.151.500	973.166.171	3.911.560	1.998.670.000	117.633.750	32.4
6	PICK UP	5.010	145.846.000	0	4.761.000	8.140	12.721.990.633	634.474.500	575.596.378	4.902.360	816.666.300	72.095.000	15.2
7	SEDAN	303	27.992.500	0	1.542.500	0	431.183.150	52.435.000	12.509.287	52.080	46.016.300	3.553.000	5
8	MPD MOTOR R2	64.066	11.661.179.000	0	5.922.000	154.080	11.803.527.705	1.057.096.000	738.632.283	365.530	2.428.187.000	234.432.000	29.7
9	MPD MOTOR R3	13	137.000	0	0	0	2.383.500	0	211.500	0	441.700	89.000	
10	TRUCK	2.239	147.616.000	0	5.457.500	31.800	10.285.732.000	406.234.000	402.399.471	6.882.620	465.260.100	31.300.000	11.8
		<b>88.874</b>	<b>13.812.496.500</b>	<b>0</b>	<b>61.305.000</b>	<b>493.820</b>	<b>69.916.839.466</b>	<b>1.487.548.800</b>	<b>3.861.970.981</b>	<b>24.274.600</b>	<b>6.146.352.700</b>	<b>492.384.690</b>	<b>99.4</b>

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN PER GOLONGAN KENDARAAN**  
WILAYAH: DURI USER \* ALL \* JENIS PENDAFTARAN: \* ALL \*  
TANGGAL: 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

Golongan Kendaraan	Unit	BBN-KB			PKB				SWDKLLJ		TOTAL	
		Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok		Denda
BUS	17	0	0	0	0	29.990.000	0	212.790	0	1.944.000	118.500	33.922.230
BERP	1.853	222.886.500	0	11.441.000	113.600	6.486.707.000	257.464.000	229.377.672	5.383.780	275.145.300	21.085.000	7.637.303.832
LIGHT TRUCK	387	19.842.000	0	1.047.500	0	863.433.500	103.621.500	70.422.543	156.780	67.244.700	7.140.000	11.984.903.523
MICROBUS	410	11.331.000	0	411.000	0	482.661.500	54.051.500	39.393.076	559.770	45.177.500	4.945.250	26.840.596
MINIBUS	13.896	775.636.500	0	30.722.500	186.200	26.828.476.438	922.151.500	973.166.171	3.911.560	1.998.670.000	117.633.750	32.851.883.639
PICK UP	5.010	145.846.000	0	4.761.000	8.140	12.721.990.633	634.474.500	575.596.378	4.902.360	816.666.300	72.095.000	13.244.341.531
SEDAN	303	27.992.500	0	1.542.500	0	431.183.150	52.435.000	12.509.287	52.080	46.016.300	3.553.000	597.303.817
MPD MOTOR R2	64.066	11.661.179.000	0	5.922.000	154.080	11.803.527.705	1.057.096.000	738.632.283	365.530	2.428.187.000	234.432.000	29.742.431.598
MPD MOTOR R3	13	137.000	0	0	0	2.383.500	0	211.500	0	441.700	89.000	3.883.230
TRUCK	2.239	147.616.000	0	5.457.500	31.800	10.285.732.000	406.234.000	402.399.471	6.882.620	465.260.100	31.300.000	11.379.997.491
	<b>88.874</b>	<b>13.812.496.500</b>	<b>0</b>	<b>61.305.000</b>	<b>493.820</b>	<b>69.916.839.466</b>	<b>1.487.548.800</b>	<b>3.861.970.981</b>	<b>24.274.600</b>	<b>6.146.352.700</b>	<b>492.384.690</b>	<b>99.431.158.417</b>





LAPORAN REKAP PENERIMAAN PERGOLONGAN KENDARAAN  
 MULAI 15 AGUSTUS 2019 – 14 OKTOBER 2019  
 (3 bulan sebelum pemutihan pajak)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN REKAP PENERIMAAN PER GOLONGAN KENDARAAN  
 WILAYAH : DURI USER : \* ALL \* JENIS PENDAFTARAN : \* ALL \*  
 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019 S/D 14 OKTOBER 2019

No	Golongan Kendaraan	Unt	BBN-KB				PKB				SWDKLLJ		
			Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok	Denda	
1	BUS	3	0	0	0	0	8.112.000	0	0	0	0	300.000	75.000
2	BEP	305	44.897.000	0	2.742.500	0	1.069.482.000	31.917.000	57.248.564	996.800	43.317.800	3.255.000	1.271.656.664
3	IGHT TRUCK	85	1.504.000	0	152.000	0	207.747.500	8.034.000	11.894.433	0	14.161.000	1.020.000	20.112.933
4	ICROBUS	47	2.007.000	0	411.000	0	38.139.000	6.906.000	8.624.345	24.200	5.504.500	807.750	94.523.795
5	TINIBUS	2.140	111.666.000	0	5.638.000	125.000	4.049.110.045	80.873.500	180.967.829	1.140.700	302.264.100	17.162.500	4.877.367.694
6	ICK UP	986	34.896.000	0	1.418.000	0	2.570.027.478	99.456.500	143.245.977	430.880	158.375.700	12.945.000	3.069.595.535
7	EDAN	36	4.337.500	0	878.500	0	33.790.500	0	702.255	0	5.124.700	140.000	67.373.455
8	PD MOTOR R2	11.537	1.992.056.000	0	1.184.000	0	2.108.977.715	128.353.000	160.864.213	9.270	425.835.700	41.644.000	5.168.545.898
9	PD MOTOR R3	1	0	0	0	0	159.000	0	0	0	25.000	0	194.000
10	RUCK	501	18.244.000	0	965.500	0	1.821.608.000	26.718.500	101.820.666	112.950	80.707.600	4.640.000	2.082.417.216
		15.641	2.209.407.500	0	13.389.500	125.000	11.950.153.238	382.158.500	665.348.284	2.714.820	1.035.652.100	81.689.250	16.880.478.192

LAPORAN REKAP PENERIMAAN PER GOLONGAN KENDARAAN  
 WILAYAH : DURI USER : \* ALL \* JENIS PENDAFTARAN : \* ALL \*  
 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2019 S/D 14 OKTOBER 2019

Golongan Kendaraan	Unt	BBN-KB				PKB				SWDKLLJ		TOTAL		
		Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok	Tunggakan	Denda	Dnd Kas	Pokok	Denda			
US	3	0	0	0	0	8.112.000	0	0	0	0	0	300.000	75.000	8.693.000
BEP	305	44.897.000	0	2.742.500	0	1.069.482.000	31.917.000	57.248.564	996.800	43.317.800	3.255.000	1.271.656.664		
IGHT TRUCK	85	1.504.000	0	152.000	0	207.747.500	8.034.000	11.894.433	0	14.161.000	1.020.000	20.112.933		
ICROBUS	47	2.007.000	0	411.000	0	38.139.000	6.906.000	8.624.345	24.200	5.504.500	807.750	94.523.795		
TINIBUS	2.140	111.666.000	0	5.638.000	125.000	4.049.110.045	80.873.500	180.967.829	1.140.700	302.264.100	17.162.500	4.877.367.694		
ICK UP	986	34.896.000	0	1.418.000	0	2.570.027.478	99.456.500	143.245.977	430.880	158.375.700	12,945.000	3,069,595,535		
EDAN	36	4,337,500	0	878,500	0	33,790,500	0	702,255	0	5,124,700	140,000	67,373,455		
PD MOTOR R2	11,537	1,992,056,000	0	1,184,000	0	2,108,977,715	128,353,000	160,864,213	9,270	425,835,700	41,644,000	5,168,545,898		
PD MOTOR R3	1	0	0	0	0	159,000	0	0	0	25,000	0	194,000		
RUCK	501	18,244,000	0	965,500	0	1,821,608,000	26,718,500	101,820,666	112,950	80,707,600	4,640,000	2,082,417,216		
	15,641	2,209,407,500	0	13,389,500	125,000	11,950,153,238	382,158,500	665,348,284	2,714,820	1,035,652,100	81,689,250	16,880,478,192		

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN PERGOLONGAN KENDARAAN**  
**MULAI 15 OKTOBER 2019 – 14 DESEMBER 2019**  
 (3 bulan setelah pemutihan pajak)

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN PERGOLONGAN KENDARAAN**  
 WILAYAH : DURI, USER : \* ALL \* , JENIS PENDAFTARAN : \* ALL \*  
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2019 S/D 14 DESEMBER 2019

No	Golongan Kendaraan	Unit	RHN-KH			PKB			SWIKLIJ		T		
			Pokok	Tunggakan	Denda	Unit Kas	Pokok	Tunggakan	Denda	Unit Kas		Pokok	Denda
1	TRUK	358	39.270.000	0	0	0	1.164.339.000	130.594.000	0	0	37.262.200	3.133.000	1,4
2	TRUK BTRK	86	1.392.000	0	0	0	184.422.600	41.212.500	0	0	16.755.700	1.860.000	7
3	TRUK ODONG	60	372.000	0	0	0	39.161.000	21.197.000	0	0	7.145.000	930.250	
4	BUS/HRON	7.242	136.189.300	0	0	0	4.750.376.943	491.748.500	0	0	283.375.800	27.076.750	5,0
5	TRUK UD	853	30.063.000	0	0	0	2.132.405.173	302.569.000	0	0	157.933.500	14.370.000	2,2
6	MOTOP	63	11.337.000	0	0	0	91.853.650	45.777.000	0	0	12.292.400	1.238.000	1
7	SPESIAKTOR B2	11.023	1.000.215.000	0	1.139.000	0	2.102.255.000	492.000.000	190.955	0	501.005.000	42.010.000	5,3
8	SPESIAKTOR R3	5	127.000	0	0	0	1.023.000	0	0	0	161.700	32.000	
9	TRUKOR	121	26.000.000	0	0	0	2.156.430.000	220.310.000	0	0	100.291.400	8.755.000	2,2
		16.396	2.082.662.000	0	1.139.000	0	12.699.877.328	1.739.792.500	170.955	0	1.244.840.900	101.438.000	18,3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

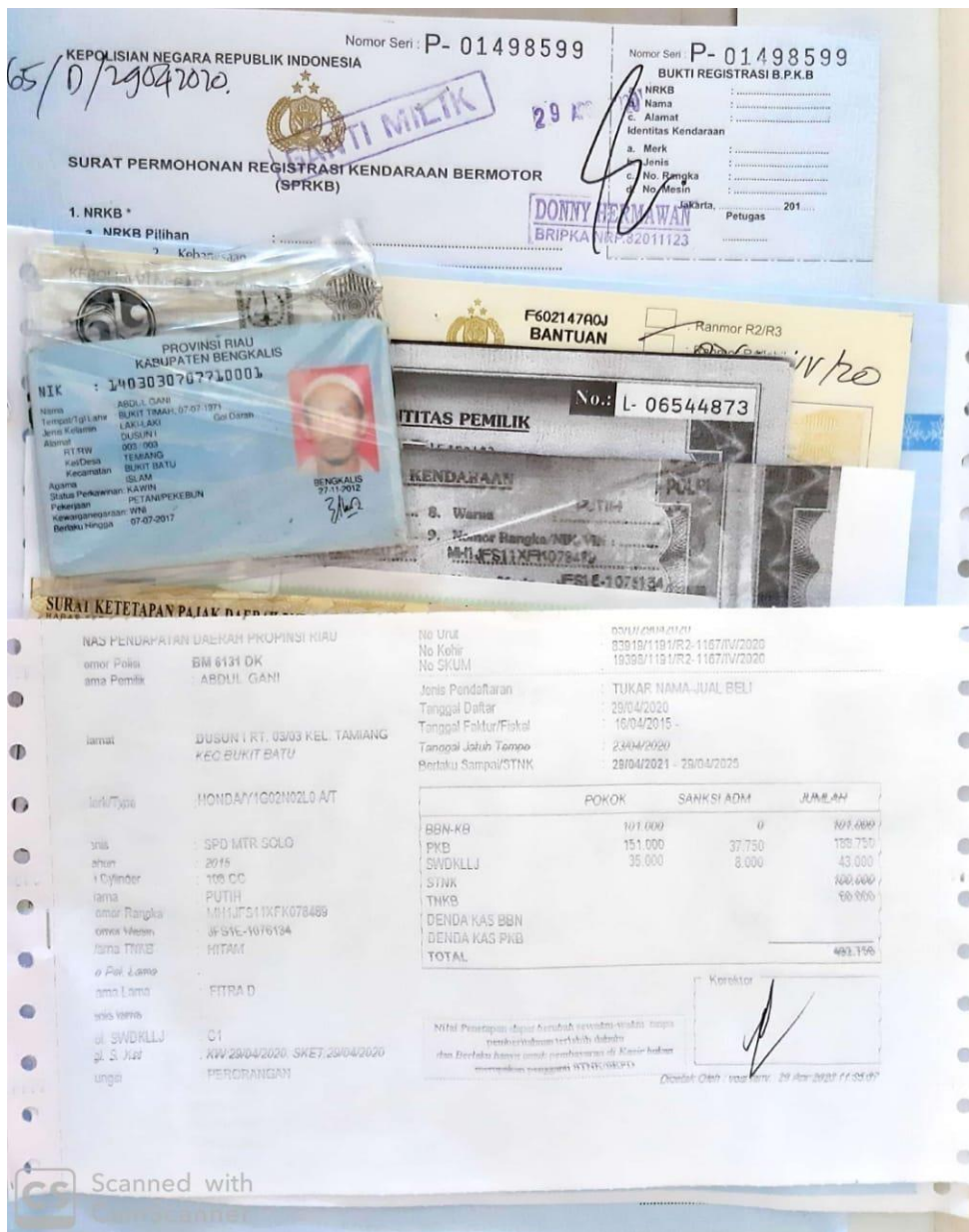
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**BERKAS WP YANG MENGIKUTI PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR RODA DUA  
(Berkas sebelum pemutihan)**



**SURAI KETETAPAN PAJAK**

	POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH
BBN-KB	101.000	0	101.000
PKB	151.000	37.750	188.750
SWDKLLJ	35.000	8.000	43.000
STNK			100.000
TKKB			60.000
DENDA KAS BBN			
DENDA KAS PKB			
<b>TOTAL</b>			<b>402.750</b>

**Surat Keterangan Pemohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB)**  
Nomor Seri: P- 01498599

**TITAS PEMILIK**  
No. L- 06544873

**Surat Permoohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB)**  
Nomor Seri: P- 01498599

**PROVINSI RIAU  
KABUPATEN BENGKALIS**  
NIK : 140303070710001

**Surat Keterangan Pemohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB)**  
Nomor Seri: P- 01498599

BERKAS WP YANG MENGIKUTI PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR RODA DUA  
(Berkas sesudah pemutihan)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

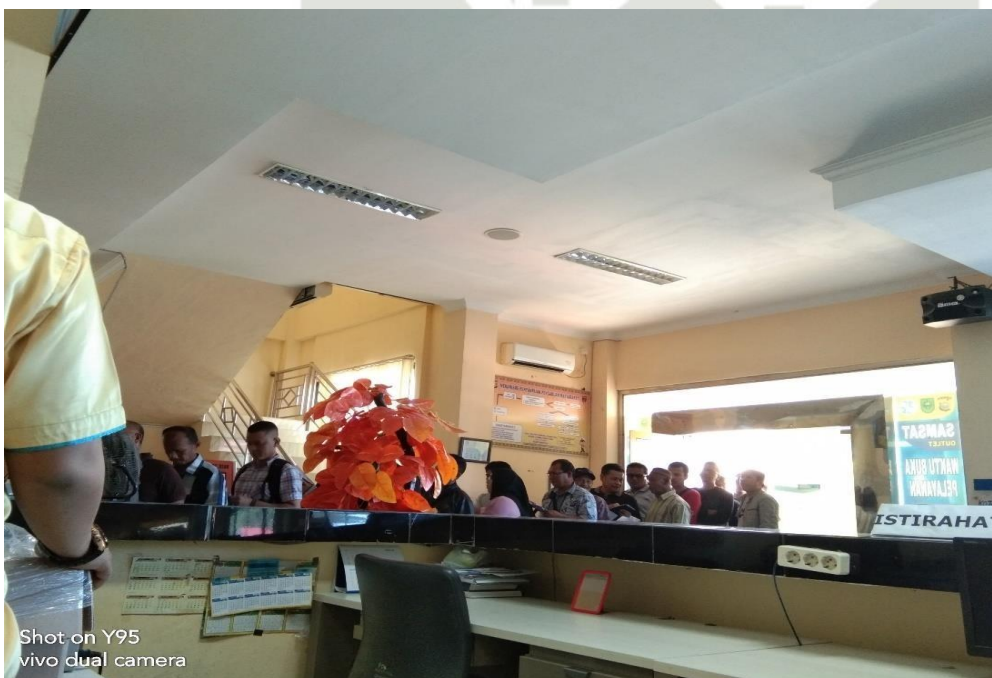


## PEMERIKSAAN PAJAK MENGGUNAKAN APLIKASI E-SAMSAT

The screenshot displays the E-SAMSAT application interface. At the top right, a large red banner shows the total amount of 447.000. The interface is divided into several sections:

- Header:** Nomor Polisi (BM 6131 DK), No Urut SHIPD (0090165), Tanggal Bayar (29/04/2020).
- Identitas Baru:** TUKAR NAMA, JUAL BELI.
- IDENTITAS PEMILIK & KENDARAAN BARU:**
  - Nama Pemilik: ABDUL GANI
  - Alamat: DUSUN I RT. 03/03 KEL. TAMIANG KEC. BUKIT BATU
  - W/ayah: BENGKALIS
  - Jenis: SEPEDA MOTOR
  - Model: SPD MTR SOLD
  - Golongan Kendaraan: SPD MOTOR R2
  - Merak: HONDA
  - Type: YTG02N02L0A/T
  - No Rangka: MH1JFST1XFK078489
  - No Mesin: JF5TE1076134
  - Warna Kendaraan: PUTIH
  - Tahun Pembuatan: 2015
  - Tal Cylinder: 108 CC
  - Warna TNKB: HITAM
  - Bahan Bakar: BENSOIN
  - No BPKB: 0
  - Jml Sumbu: 0
- Table of Taxes:**

	BERJALAN		TUNGGAKAN		TOTAL
	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	
BBN	101.000	0	0	0	101.000
PKB	151.000	0	0	0	151.000
SWDKLLJ	35.000	0	0	0	35.000
PNBP PENGESAHAN					0
PNBP STNK					100.000
PNBP TNKB					60.000
<b>TOTAL</b>					<b>447.000</b>
- Footer:** Rabu, 29 April 2020, wit maharni, CAPS, NUM, INS, LENOVO-PC, IP: 192.168.33.56, MySQL v.5.6.27-log, EPSON LQ-2190 ESC/P2, 44-37-E6-E3-D

WP YANG MENGANTRI DIHARI PEMUTIHAN PAJAK SUDAH MULAI  
DILAKSANAKAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un. 04/F.VII/PP.00.9/344/2020

Pekanbaru, 21 Januari 2020 M

: Biasa

25 Jumadil Awwal 1441 H

: -

: **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada

Yth. **Sahwitri Triandani, SE, M. Si**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : Lilis Yuningsih

NIM : 01770623312

Jurusan : D-III Perpajakan

Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul : **“Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian tersebut diatas.

Demikianlah disampaikan atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dekan



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1003

UIN SUSKA RIAU  
 Potamilik UIN Suska Riau  
 ndung Undangan  
 ngutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 an hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 an tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 engumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/30059  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor Un.04/FV/II/PP.00.9/343/2020 Tanggal** , dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **LILIS YUNINGSIH**
- 2. NIM / KTP : **01770623312**
- 3. Program Studi : **PERPAJAKAN**
- 4. Jenjang : **DIII**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**
- 7. Lokasi Penelitian : **UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI**


Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 Januari 2020

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
- 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

**TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Lilis Yuningsih, dilahirkan di Duri, 07 April 2000. Ayahanda bernama Jamhuri dan Ibunda bernama Paenah, Sp. Penulis anak pertama dari dua bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di TK At - Taqwa yang selesai pada tahun 2005. Kemudian dilanjutkan pada

Pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 35 Petani mulai dari kelas 1 - 3 dan dilanjutkan di Sekolah Dasar (SD) Negeri N0. 60 Petani mulai dari kelas 4 - 6 dan selesai pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingkat pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Mandau yang berakhir pada tahun 2014. Dilanjutkan pada pendidikan tingkat atas yaitu pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 03 Mandau dan tamat pada tahun 2017. Tepatnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikann di Perguruan Tinggi Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dibawah Bimbingan Ibu Sahwitri Triandani, SE, M. Si pada 2 Maret 2020 dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN DURI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.